



PEMERINTAH PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN

Rancangan Akhir

# RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

1.02.0.00.0.00.03.0000

**RUMAH SAKIT JIWA SAMBANG  
LIHUM**



## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, Review Rencana Kerja (Renja) RSJ Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023 dapat diselesaikan sebagaimana termuat dalam dokumen ini. Penyusunan Review Renja ini merupakan media untuk memberikan informasi gambaran tentang Rencana Kerja Tahun Anggaran 2023 dan Evaluasi Kegiatan Tahun Anggaran 2021 pada RSJ Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada berbagai pihak yang telah membantu terselesaikannya dokumen Review Rencana Kerja (Renja) RSJ Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023.

Kami mengharapkan dokumen Review Rencana Kerja RSJ Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan ini dapat memberikan manfaat bagi yang membaca dan menggunakannya. Dokumen ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas perencanaan dan program kerja di RSJ Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan.

Semoga Allah Subhanahuwataa'la menjadikan bahan ini menjadi amal ibadah kita bersama.

Banjarbaru, Juli 2022  
Direktur,

  
**Dr. dr. Anna Martiana Afida, Sp.PK, M.P.H**

Pembina Tk. I

NIP. 19690312 200003 2 001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>DAFTAR ISI</b>	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penyusunan.....	6
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU</b>	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	12
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....	15
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	15
2.5 Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	19
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	23
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	23
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja.....	31
3.3 Program dan Kegiatan.....	30
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>	39
<b>BAB V PENUTUP</b>	42

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

#### **A. Pengertian**

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (Satu) tahun. (UU No. 25 Tahun 2004). Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan merupakan uraian yang lebih terinci dari Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah. Rencana kerja memuat kebijakan, program, kebijakan dan sub kegiatan pembangunan serta pelayanan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (Satu) tahun. Pemendagri No. 86 Tahun 2017. Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menyusun Rencana Kerja satu tahun ke depan (tahun anggaran 2023) yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu 2017-2021 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala.

Rencana kerja tersebut ditindaklanjuti dengan penyusunan kegiatan dan sub kegiatan untuk mewujudkan kinerja aparatur Pemerintah dan kelembagaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang akomodatif terhadap tuntutan masyarakat akan pelayanan yang mudah, cepat, transparan dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Rencana kerja Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum bersinergi dengan Visi dan Misi yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar Visi dan Misi yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah termasuk Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum.

#### **B. Tahapan dan Tatacara Penyusunan Renja SKPD**

1. Persiapan Penyusunan Renja SKPD
2. Penyusunan Rancangan Renja SKPD
3. Pelaksanaan Forum SKPD
4. Penetapan Renja SKPD

**a). Persiapan Penyusunan Renja SKPD**

Tahapan persiapan penyusunan Renja SKPD meliputi :

- 1) Pembentukan tim penyusunan Renja SKPD
- 2) Orientasi mengenai Renja SKPD
- 3) Penyusunan agenda kerja
- 4) Pengumpulan data dan informasi.

**b). Penyusunan Rancangan Renja SKPD**

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (Satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Tahapan penyusunan rancangan Renja SKPD :

1) Tahap perumusan rancangan Renja SKPD

Perumusan rancangan Renja SKPD dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengolahan data dan informasi.
- b. Analisis gambaran pelayanan SKPD
- c. Mereviu hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD.
- d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.
- e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD.
- f. Perumusan tujuan dan sasaran.
- g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat.
- h. Perumusan kegiatan prioritas.
- i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja SKPD.
- j. Penyempurnaan rancangan Renja SKPD.
- k. Pembahasan forum SKPD, dan
- l. Penyesuaian dokumen rancangan Renja SKPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan menteri terkait dan SPM.

2) Tahap Penyajian Rancangan Renja SKPD

Penyajian rancangan Renja SKPD sekurang-kurangnya dapat disusun menurut sistematika.

**c). Pelaksanaan Forum SKPD**

Forum SKPD merupakan wadah penampungan dan penjaringan aspirasi masyarakat dan dunia usaha (pemangku kepentingan). Untuk

penyempurnaan rancangan kebijakan Penyusunan Renja SKPD, hal ini menunjukkan dalam pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (*bottom up planning*) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi. Dalam proses penyusunan Renja SKPD pelaksanaan forum konsultasi publik dipisahkan antara kabupaten/kota dengan provinsi.

Tujuan forum SKPD kabupaten/kota adalah :

- 1) Menyelaraskan program dan kegiatan SKPD kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan.
- 2) Mempertajam indikator serta target program dan kegiatan SKPD kabupaten,kota sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.
- 3) Menyelaraskan program dan kegiatan antar SKPD kbupaten/kota dengan SKPD lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan untuk sinergi pelaksanaan prioritas pembangunan daerah, dan
- 4) Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD kabupaten/kota.

**d). Penetapan Renja SKPD**

Penetapan rancangan akhir Rencana Kerja SKPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala SKPD menetapkan Renja SKPD untuk menjadi pedoman di lingkungan SKPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas SKPD pada tahun anggaran berkenaan.

**e). Verifikasi Rancangan Renja SKPD dengan RKPD**

Verifikasi terhadap Rancangan Renja SKPD bertujuan untuk menilai apakah rancangan akhir Renja SKPD sudah sesuai dengan RKPD yang sudah disahkan dengan peraturan kepala daerah, dilakukan sebagai berikut :

1. Kepala SKPD menyampaikan rancangan akhir Renja SKPD kepada kepala Bappeda.
2. Bappeda melakukan verifikasi akhir terhadap rancangan akhir Renja SKPD, untuk menjamin kesesuaian antara program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD.
3. Bappeda menghimpun seluruh rancangan akhir Renja SKPD yang telah verifikasi, untuk diajukan kepada kepala daerah dalam rangka, memperoleh pengesahan.

**f). Pengesahan Renja SKPD Oleh Kepala Daerah**

1. Pengesahan rancangan akhir Renja SKPD dengan peraturan kepala daerah paling lama 1 (satu) bulan, setelah peraturan kepala daerah tentang RKPD tahun berkenaan ditetapkan.
2. Penetapan Renja SKPD oleh kepala SKPD paling lama 14 (empat belas) hari, setelah Renja SKPD disahkan oleh kepala daerah.

**1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024.
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
16. Peraturan Daerah (Perda) Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
17. Peraturan Daerah (Perda) Kalimantan Selatan Nomor 023 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan.
18. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 017 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 066 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
19. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 025 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 066 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
20. Peraturan Daerah (Perda) Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026.
21. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 015 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Tahun 2021-2026.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Renja SKPD Rumah sakit Jiwa Sambang Lihum tahun 2023 adalah untuk melaksanakan dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta menggambarkan capaian kinerja yang

dapat ditransformasikan pada Rencana Kerja Anggaran SKPD. Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum adalah :

1. Mendeskripsikan tentang program-program dan kegiatan-kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum.
2. Program-program dan kegiatan-kegiatan tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program-program dan kegiatan-kegiatan prioritas.

#### **1.4 Sistematis Penulisan**

##### **BAB I PENDAHULUAN**

###### 1.1 Latar Belakang

###### 1.2 Landasan Hukum

###### 1.3 Maksud dan Tujuan

###### 1.4 Sistematika Penulisan

##### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

###### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

###### 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

###### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

###### 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

###### 2.5 Penelaahan Usaha Program dan Kegiatan Masyarakat

##### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

###### 3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional

###### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

###### 3.3 Program dan Kegiatan

##### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

##### **BAB V PENUTUP**

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Mengacu pada Rencana Strategis Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 visi “Kalimantan Selatan Maju (Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) sebagai Gerbang Ibu Kota Negara” merupakan visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang akan dicapai, Seluruh Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, termasuk RS Jiwa Sambang Lihum mempunyai tanggung jawab yang sama, dengan fokus yang berbeda. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 ini, selain menyelesaikan isu yang bersifat lokal, juga mempertimbangkan isu-isu yang bersifat nasional dan global, seperti pertumbuhan dan pemerataan, kemiskinan, pengangguran, lingkungan hidup dan penataan ruang.

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum tahun 2023 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum tahun 2021 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan.

Penyusunan Renja Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum tahun 2023 memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut :

- a. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.
- b. Tujuan yang dikehendaki
- c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya
- d. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana.

Evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Dinas adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah.

Dalam rangka mencapai visi dan misi sesuai tugas pokok dan fungsinya, RS Jiwa Sambang Lihum pada tahun 2021 melaksanakan 3 Program dan

diimplementasikan dalam bentuk 7 Kegiatan dan 10 Sub Kegiatan sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut :

No.	Program	Kegiatan & Sub Kegiatan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah a. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1) Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi a. Pengadaan Sarana dan Fasilitas Layanan Kesehatan (DAK) b. Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya. 2) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi a. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) b. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

No.	Program	Kegiatan & Sub Kegiatan
		3) Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi a. Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi a. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan

Pengukuran evaluasi hasil rencana kerja RS Jiwa Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan realisasi fisik yang telah dilaksanakan semuanya 100% berdasarkan kegiatan tahun anggaran 2021. Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2021 terdiri dari 9 sub kegiatan yang bersumber dana dari APBD dan 1 kegiatan yang bersumber dana dari APBN (DAK). Pada tahun 2023, RS Jiwa Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan memiliki 15 sub kegiatan dengan sumber anggaran APBD dan 1 sub kegiatan dengan sumber anggaran BLUD. Perkiraan evaluasi hasil rencana kerja RS Jiwa Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022 dilaksanakan 100%.

Pengukuran Evaluasi Hasil Renja RS Jiwa Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan didasarkan pada sasaran strategis dan capaian sasaran sebagaimana terlihat dalam tabel berikut :

**Tabel T- C.29**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat**  
**Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026**  
**Provinsi Kalimantan Selatan**

**Unit Organisasi : RSJ Sambang Lihum**  
**Sub Unit Organisasi : RSJ Sambang Lihum**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021 (n-2)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-1))		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (berjalan)		
			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-1))	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)						
<b>1.</b>	<b>Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar</b>															
<b>1.02</b>	<b>Bidang Urusan Kesehatan</b>															
<b>1.02.01</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>															
1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
1.02.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan jumlah dokumen laporan capaian kinerja yang tersusun	20	Doku- men	0	Doku- men	4	Doku- men	4	Doku- men	100%	2	Doku- men	6	Dokumen	30%
1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
1.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya/terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	60	Bulan	0	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%	12	Bulan	24	Bulan	40%
1.02.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Administrasi keuangan dapat dikelola dengan baik	60	Bulan	0	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%	12	Bulan	24	Bulan	40%
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
1.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit bangunan yang dipelihara	50	Unit	0	Unit	16	Unit	16	Unit	100%	3	Unit	19	Unit	38%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021 (n-2)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-1))		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (berjalan)		
			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-1))	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)						
<b>1.02.02</b>	<b>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</b>															
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi															
1.02.02.1.01.11	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan (DAK)	Meningkatnya sarana dan prasarana yang terpenuhi sesuai standar RS Khusus A	5	Paket	0	Paket	1	Paket	1	Paket	100%	0	Paket	1	Paket	20%
1.02.02.1.01.22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah obat-obatan, makan dan minum pasien yang tersedia	60	Bulan	0	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%	12	Bulan	24	Bulan	40%
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi															
1.02.02.1.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah pelayanan kesehatan orang dengan masalah kesehatan jiwa	60	Bulan	0	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%	12	Bulan	24	Bulan	40%
1.02.02.1.02.16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah pelayanan terhadap masyarakat miskin/tidak mampu yang tidak mempunyai jaminan pembiayaan kesehatan	60	Bulan	0	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%	12	Bulan	24	Bulan	40%
1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi															
1.02.02.1.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Tingkat akreditasi rumah sakit	100	%	0	%	100	%	100	%	100%	85	%	92.5	%	93%
<b>1.02.03</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</b>															
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi															
1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan	35	Kegiatan	0	Kegiatan	7	Kegiatan	7	Kegiatan	100%	7	Kegiatan	14	Kegiatan	40%

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pengukuran kinerja RS Jiwa Sambang Lihum pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap kinerja baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Penetapan indikator kinerja tersebut didasarkan pada kelompok menurut masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*), terhadap pelaksana kegiatan pelayanan untuk mencapai visi RS Jiwa Sambang Lihum yang telah ditetapkan pada Renstra 2021-2026.

Sesuai dengan tugas pokok RS Jiwa Sambang Lihum yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penyelenggaraan upaya penyembuhan dan pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara serasi terpadu dan berkesinambungan dengan upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja RS Jiwa Sambang Lihum adalah sebagai berikut :

1. Tingkat hunian efektif dan efisien
2. Terlaksananya pelayanan spesialisasi pada pasien rawat jalan
3. Meningkatnya jumlah kunjungan pengguna Rumah Sakit
4. Bertambahnya jenis layanan
5. Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM
6. Meningkatnya rasio efektifitas pendapatan
7. Meningkatnya kualitas dan kuantitas Sarana Alat Kesehatan.

Pencapaian Indikator Kinerja Pelayanan RS Jiwa Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan seperti yang terlihat pada berikut :

**Tabel T- C.30**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan**

**Unit Organisasi : RSJ Sambang Lihum**  
**Sub Unit Organisasi : RSJ Sambang Lihum**

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (n - 2)	Tahun 2022 (n - 1)	Tahun 2023 (n)	Tahun 2024 (n + 1)	Tahun 2021 (n - 2)	Tahun 2022 (n - 1)	Tahun 2023 (n)	Tahun 2024 (n + 1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	<b>Kesehatan</b>											
1	Persentase angka penggunaan tempat tidur/Bed Occupancy Ratio (BOR)	60	60	50	55	65	70	48.91		65.00	70.00	Pandemi Covid-19
2	Jumlah hari rata-rata pasien dirawat/Average Length of Stay (ALOS)	40	40	< 35	< 35	< 35	< 35	39.05		< 35	< 35	Pasien Transit
3	Jumlah rata-rata penggunaan satu tempat tidur/Bed Turn Over (BTO)	10	10	10	10	10	10	6.55		10.00	10.00	Pandemi Covid-19
4	Jumlah rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati/Turn Over Interval (TOI)	15	15	15	15	15	15	28.48		15.00	15.00	Pandemi Covid-19
5	Jumlah angka kematian umum untuk setiap per mil pasien/Gross Death Rate (GDR)	< 45	< 45	< 15	< 15	< 15	< 15	7.13		< 15	< 15	

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (n - 2)	Tahun 2022 (n - 1)	Tahun 2023 (n)	Tahun 2024 (n + 1)	Tahun 2021 (n - 2)	Tahun 2022 (n - 1)	Tahun 2023 (n)	Tahun 2024 (n + 1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<b>1. Kesehatan</b>												
6	Jumlah angka kematian $\geq$ 48 jam setelah dirawat per mil pasien / Nett Death Rate (NDR)	< 25	< 25	< 15	< 15	< 15	< 15	6.12		< 15	< 15	
7	Jumlah kunjungan pasien IGD	Pm	Pm	2400	2450	2500	2550	2425		2500	2550	
8	Jumlah kunjungan rawat jalan	Pm	Pm	19000	19500	20000	20500	19091		20000	20500	
9	Rasio kunjungan baru per hari rawat jalan	Pm	Pm	3	3	3	3	4		3	3	
10	Rerata kunjungan rawat jalan per hari	Pm	Pm	60	65	70	75	52		70	75	
11	Rasio kunjungan baru terhadap total kunjungan rawat jalan	Pm	Pm	6	6	6	6	6		6.00	6.00	
12	Nilai Kepuasan Masyarakat (Konversi) terhadap seluruh layanan RS	Pm	80	95	95	95	95	93.61		95	95	

### 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Pandemi Covid-19 pada tahun 2021 di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan berdampak pada pelayanan di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum karena Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum berfokus pada pelayanan pasien jiwa yang terpapar virus Covid-19 sehingga pelayanan untuk pasien jiwa dan napza dibatasi baik dari jumlah pasiennya di instalasi rawat inap dan waktu pelayanannya di instalasi rawat jalan. Hal ini dikarenakan sebagian tempat tidur pasien jiwa di instalasi rawat inap digunakan untuk merawat pasien jiwa yang terpapar Covid-19 dan hal ini berdampak pada capaian nilai *Bed Occupancy Ratio (BOR)*, *Average Length of Stay (AvLOS)*, *Bed Turn Over (BTO)* dan *Turn Over Interval (TOI)*. Selain itu, akses ke Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum juga belum terdapat transportasi umum sehingga berdampak kesulitannya pasien dan keluarga untuk berobat ke Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum karena pasien dan keluarga harus membayar biaya lebih untuk mendapat transportasi ke Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum dan hal ini berdampak pada berkurangnya jumlah kunjungan pasien. Tingginya angka *Average Length of Stay (AvLOS)* disebabkan lama dirawatnya pasien transit di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum dimana pasien transit merupakan pasien yang tidak diterima keluarga dan lingkungan sekitar pada saat pasien diperbolehkan pulang oleh dokter.

Dari analisis situasi dan kecenderungan di atas dan dengan memperhatikan perkembangan dan tantangan yang mutakhir dewasa ini, maka isu strategis yang masih dihadapi dalam pembangunan kesehatan jiwa di Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut:

1. Terbatasnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan jiwa yang berkualitas, terutama pada kelompok rentan seperti penduduk miskin, daerah tertinggal dan terpencil.
2. Belum terlindunginya masyarakat secara maksimal terhadap beban pembiayaan kesehatan jiwa
3. Belum terpenuhinya jumlah, jenis, kualitas serta penyebaran sumber daya manusia kesehatan jiwa secara menyeluruh dan belum optimalnya dukungan kerangka regulasi ketenagaan kesehatan.
4. Belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat.
5. Belum optimalnya ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat esensial.

6. Permasalahan manajerial dalam sinkronisasi perencanaan, kebijakan program dan anggaran serta masih terbatasnya koordinasi dan integrasi Lintas Sektor.
7. Disparitas antar wilayah, golongan pendapatan dan *urban-rural* masih terjadi, untuk ini diperlukan pendekatan pembangunan sesuai kondisi wilayah.
8. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan jiwa belum dilakukan secara optimal.
9. Belum tersedianya biaya secara menyeluruh operasional kesehatan jiwa yang memadai di Puskesmas.
10. Pandemi Covid-19 yang menyebabkan pengangguran meningkat, kemiskinan meningkat dan UMKM menurun.

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rancangan awal RKPD merupakan hasil dari proses pelaksanaan perencanaan yang di amanatkan di dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan dan Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. Dimana dalam kerjasama yang baik dari semua masyarakat (*stakeholders*), instansi vertikal, eksekutif maupun legislatif, sehingga prses perencanaan pembangunan yang dihasilkan dapat meingkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik.

Dalam proses perencanaan awal program dan kegiatan RKPD dengan program dan kegiatan yang telah disetujui di dalam pelaksanaan APBD tahun 2023, memang beberapa usulan yang di ajukan didalam rancangan awal RKPD tidak sama dengan alokasi rencana yang telah ditetapkan. Hal itu disebabkan karena adanya beberapa perubahan-perubahan mengenai peraturan Perundang-undangan, kebijakan dan arahan dari berbagai pihak dalam mewujudkan target dan sasaran pembangunan nasional terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan RS Jiwa Sambang Lihum tahun 2023 guna mendukung target dan sasaran pembangunan di daerah sebagai berikut :

Tabel T- C.31  
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023  
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Unit Organisasi :  
Sub Unit Organisasi :

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting									
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)									
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					Kab. Banjar					86,475,492	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Kab. Banjar					74,882,794		
1	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					Kab. Banjar					86,475,492	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Kab. Banjar					74,882,794	
1	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					Kab. Banjar	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100	62,180,692	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Kab. Banjar	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100 Poin	60,433,936				
1	2	1	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Kab. Banjar	Nilai SAKIP Rumah Sakit	80%	10,250	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Banjar	Persentase Terpenuhiya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	9,402			
1	2	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Kab. Banjar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Banjar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2,826		
1	2	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD					Kab. Banjar	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1,500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Kab. Banjar	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1,368		
1	2	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Kab. Banjar	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1,500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Banjar	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1,386		
1	2	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Kab. Banjar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2,500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Banjar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2,196		
1	2	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Kab. Banjar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1,750	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Banjar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1,626		
1	2	1	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Kab. Banjar	Persentase Serapan Anggaran Rumah Sakit	100%	31,389,411	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Banjar	Terpenuhiya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Keuangan	100%	37,620,512			
1	2	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Kab. Banjar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	252 Orang/Bulan	31,339,011	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Banjar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	252 Orang/Bulan	37,570,112	SOTK Baru, Penambahan CPNS & PPPK	
1	2	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					Kab. Banjar	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	50,400	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Banjar	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	50,400		
1	2	1	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					Kab. Banjar	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan Rumah Sakit	100%	1,750,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Banjar	Terpenuhiya Kebutuhan Perlengkapan Gedung dan Peralatan Rumah Tangga	80%	78			
1	2	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Kab. Banjar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Banjar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	39		
1	2	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Kab. Banjar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	750,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Banjar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	39		
1	2	1	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Kab. Banjar	Persentase Pemenuhan Barang Penunjang Sesuai Kebutuhan Rumah Sakit	100%	1,500,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Banjar	Terpenuhiya Kebutuhan Barang Milik Daerah	80%	78			
1	2	1	1.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Kab. Banjar	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	750,000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Banjar	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	39		
1	2	1	1.07	5	Pengadaan Mebel					Kab. Banjar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	750,000	Pengadaan Mebel	Kab. Banjar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	39		
1	2	1	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Kab. Banjar	Persentase Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	3,619,200	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Banjar	Terpenuhiya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	3,494,400			
1	2	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Kab. Banjar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3,619,200	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Banjar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3,494,400		
1	2	1	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Kab. Banjar	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	100%	1,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Banjar	Terpenuhiya Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	75%	39			
1	2	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Kab. Banjar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	1,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Banjar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	39		

1	2	1	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Kab. Banjar	Persentase Meningkatnya Capaian Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik serta Meningkatnya Mutu Administrasi, Keuangan dan Akuntabilitas Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum	100%	22,911,831	Peningkatan Pelayanan BLUD	Kab. Banjar	Persentase Meningkatnya Capaian Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik serta Meningkatnya Mutu Administrasi, Keuangan dan Akuntabilitas Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum	100%	19,309,427	
1	2	1	1.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kab. Banjar	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	22,911,831	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kab. Banjar	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	19,309,427	
1	2	2			<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>Kab. Banjar</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase Pasien Berhasil Mandiri Persentase Pemenuhan Standar Akreditasi</b>	<b>90 80 85</b>	<b>18,810,000</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>Kab. Banjar</b>	<b>Angka Kematian Bayi (Per 1.000 Kelahiran Hidup) Angka Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup) Angka Kesakitan</b>	<b>8 Angka 111 Angka 12,5%</b>	<b>9,202,246</b>	
1	2	2	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Kab. Banjar	Persentase Fasilitas Pelayanan yang Terpenuhi sesuai Standar RS Khusus A	100%	15,750,000	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Kab. Banjar	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Provinsi	100%	6,339,391	
1	2	2	1.01	3	Pengembangan Rumah Sakit	Kab. Banjar	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	5,000,000	Pengembangan Rumah Sakit	Kab. Banjar	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	39	
1	2	2	1.01	9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Kab. Banjar	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	5 Unit	1,000,000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Kab. Banjar	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	5 Unit	39	
1	2	2	1.01	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Kab. Banjar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	15 Unit	2,500,000	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Kab. Banjar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	15 Unit	39	
1	2	2	1.01	14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Kab. Banjar	Jumlah Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) yang Disediakan	250 Paket	1,000,000	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Kab. Banjar	Jumlah Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) yang Disediakan	250 Paket	39	
1	2	2	1.01	22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Banjar	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan	2 Paket	6,250,000	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Banjar	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan	2 Paket	6,339,235	Meningkat Kebutuhan Obat & Makan Minum Pasien
1	2	2	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Kab. Banjar	Persentase Pasien Rawat Inap yang Mengalami Perbaikan Gejala	85%	3,000,000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Kab. Banjar	Terpenuhinya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Provinsi	100%	2,617,770	
1	2	2	1.02	16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kab. Banjar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	3,000,000	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kab. Banjar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	2,617,770	Meningkat Kebutuhan Pasien Miskin
1	2	2	1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Kab. Banjar	Persentase Pemenuhan Standar Akreditasi Rumah Sakit	85%	60,000	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Kab. Banjar	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Izin Rumah Sakit	100%	245,085	
1	2	2	1.04	3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Kab. Banjar	Persentase Pemenuhan Standar Akreditasi Rumah Sakit	85%	60,000	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Kab. Banjar	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	1 Unit	245,085	Pelaksanaan Akreditasi 2023
1	2	3			<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>Kab. Banjar</b>	<b>Rasio Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar</b>	<b>85</b>	<b>5,484,800</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>Kab. Banjar</b>	<b>Persentase Fasyankes dengan Pemenuhan SDMK Sesuai Standar</b>	<b>59%</b>	<b>5,246,628</b>	
1	2	3	1.01		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Kab. Banjar	Persentase Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Terpenuhi	100%	5,334,800	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Kab. Banjar	Persentase Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Terpenuhi	100%	5,155,620	
1	2	3	1.01	1	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kab. Banjar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	166 Orang	5,334,800	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kab. Banjar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	166 Orang	5,155,620	
1	2	3	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Kab. Banjar	Persentase ASN RSJ Sambang Lihum yang Memiliki Sertifikat Keahlian	100%	150,000	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Kab. Banjar	Persentase Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan	100%	91,008	
1	2	3	1.02	1	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kab. Banjar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	500 Orang	150,000	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kab. Banjar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	500 Orang	91,008	
<b>TOTAL ANGGARAN</b>									<b>86,475,492</b>	<b>TOTAL ANGGARAN</b>				<b>74,882,794</b>	

## **2.5 Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Rancangan rencana kerja Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan didiskusikan dalam pembahasan forum SKPD. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil Musrenbang RKPD.

Pada Forum SKPD tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada RSJ Sambang Lihum baik dari kelompok masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi dan SKPD lain. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

Sebagai SKPD dengan tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan kesehatan, Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum mempunyai tugas untuk melaksanakan upaya kesehatan jiwa secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dengan upaya peningkatan kesehatan lainnya serta pencegahan penyakit kejiwaan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pelayanan medis
2. Penyelenggaraan penunjang medis
3. Penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan
4. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan jiwa rujukan
5. Penyelenggaraan rehabilitasi korban NAPZA
6. Penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan
7. Penyusunan program dan rekam medik
8. Penyelenggaraan urusan ketetatausahaan

Tabel T- C.32  
**USULAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2023**  
**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Unit Organisasi : RSJ Sambang Lihum  
 Sub Unit Organisasi : RSJ Sambang Lihum

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL ANGGARAN</b>				<b>0</b>	

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (upper-middle income country/MIC) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005- 2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas.

Tujuan RPJMN IV tahun 2020 – 2024 telah sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Target-target dari 17 tujuan (goals) dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah ditampung dalam 7 agenda pembangunan.

Tujuh agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Untuk mempercepat pencapaian target pembangunan nasional, RPJMN IV tahun 2020 - 2024 telah ditetapkan 6 (enam) pengarusutamaan (mainstreaming) sebagai bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis pembangunan nasional yang berkeadilan dan adaptif. Keenam pengarusutamaan (mainstreaming) memiliki peran yang vital dalam pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta partisipasi dari masyarakat. Selain mempercepat dalam mencapai target-target dari fokus pembangunan, mainstreaming juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptif terhadap faktor eksternal lingkungan. Hal ini perlu dilakukan oleh Indonesia untuk mencapai tujuan global. Pengarusutamaan RPJMN IV tahun 2020 – 2024 antara lain:

1. Kesetaraan Gender

Strategi pembangunan nasional harus memasukan perspektif gender untuk mencapai pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan.

2. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien dalam mendukung peningkatan kinerja seluruh dimensi pembangunan.

3. Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan yang berkelanjutan harus dapat menjaga keberlanjutan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta meningkatkan pembangunan yang inklusif dan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

4. Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim

Pengarusutamaan Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim menitikberatkan pada upaya penanganan dan pengurangan kerentanan bencana, peningkatan ketahanan terhadap risiko perubahan iklim, serta upaya peningkatan mitigasi perubahan iklim melalui pelaksanaan pembangunan rendah karbon.

5. Modal Sosial dan Budaya

Pengarusutamaan modal sosial budaya dimaksudkan untuk menginternalisasikan nilai-nilai budaya dan memanfaatkan

(mendayagunakan) kekayaan budaya sebagai kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan.

## 6. Transformasi Digital

Perkembangan pesat teknologi khususnya teknologi digital telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Sehingga perlu untuk menyelaraskannya dengan pembangunan nasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 bahwa Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Renstra Kementerian Kesehatan 2020-2024 harus dijadikan acuan bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam menyusun perencanaan tahunan dan penyelenggaraan program pembangunan kesehatan.

### 1. Kondisi Umum

Secara umum pembangunan kesehatan telah menyebabkan terjadinya berbagai kemajuan penting dalam meningkatkan status kesehatan. Umur Harapan Hidup (UHH) orang Indonesia telah naik mengikuti tren kenaikan UHH global. Tahun 2017, UHH orang Indonesia telah mencapai 71,5 tahun, di mana UHH perempuan lebih tinggi 5 tahun dibandingkan dengan laki-laki (perempuan 74 tahun, laki-laki 69 tahun). Pendekatan terbaru untuk melihat kualitas tahun hidup, tidak semata-mata UHH, namun yang lebih penting adalah tahun hidup berkualitas (Healthy Adjusted Life Expectancy/HALE). HALE orang Indonesia secara rerata adalah 62,65 tahun, artinya terdapat 8,85 tahun yang hilang karena kualitas hidup yang buruk akibat menderita penyakit dan disabilitas. Dalam membangun SDM yang berkualitas, selisih angka inilah yang harus diperkecil.

Angka Kematian Ibu (AKI) telah menurun dari 346 kematian per 100.000 KH pada tahun 2010 (Sensus Penduduk 2010) menjadi 305 kematian per 100.000 KH pada tahun 2015 (SUPAS 2015). Angka Kematian Bayi (AKB) juga menurun dari 32 kematian per 1.000 KH pada tahun 2012 menjadi 24 kematian per 1.000 KH pada tahun 2017 (SDKI 2017). Prevalensi stunting pada balita dari 37,2% (Riskesdas 2013) turun menjadi 30,8% (Riskesdas 2018) dan 27,7% (SSGBI 2019). Prevalensi wasting menurun dari 12,1% pada tahun 2013 (Riskesdas 2013) menjadi 10,2% pada

tahun 2018 (Riskesdas 2018). Begitu pula untuk kasus gemuk, prevalensi gemuk pada balita terjadi penurunan dari 11,8% (Riskesdas 2013) menjadi 8% (Riskesdas 2018). Capaian tersebut didukung oleh berbagai upaya dalam rangka pemerataan akses pelayanan kesehatan di seluruh wilayah melalui peningkatan kinerja sistem kesehatan (upaya kesehatan, SDM kesehatan, farmasi dan alat kesehatan, pengawasan obat dan makanan), serta perlindungan finansial bagi penduduk.

Dilihat dari beban penyakit (diseases burden) yang diukur dengan Disability Adjusted Life Years (DALYs), telah terjadi transisi epidemiologi dalam tiga dekade terakhir; penyakit menular/KIA/gizi telah menurun dari 51,3% pada tahun 1990 menjadi 23,6% pada tahun 2017, penyakit tidak menular (PTM) naik dari 39,8% pada tahun 1990 menjadi 69,9% pada tahun 2017, serta cedera turun dari 8,9% pada tahun 1990 menjadi 6,5% pada tahun 2017. Indonesia mengalami beban ganda, di satu sisi PTM naik dengan signifikan, namun masih dihadapkan pada penyakit menular yang belum tuntas.

Ancaman kesehatan masyarakat lainnya yang tidak dapat diabaikan adalah ancaman dalam bentuk risiko biologi, kimia, terorisme, radio-nuklir, penyakit zoonosis (penyakit tular hewan), kedaruratan kesehatan masyarakat, dan ancaman penyakit yang baru muncul (new emerging diseases). Adanya pandemi Covid-19 di tahun 2020 harus dipergunakan sebagai pembelajaran terkait kesiapsiagaan menghadapi penyakit baru muncul (new emerging diseases), khususnya dalam menyiapkan sistem kesehatan yang mampu merespon kegawatdaruratan kesehatan masyarakat. Sekitar 70% dari penyakit infeksi pada manusia yang baru adalah penyakit zoonosis, yang sangat dipengaruhi oleh interaksi antara manusia dan lingkungannya. Penduduk Indonesia yang padat dengan geografis yang luas menyebabkan terbukanya transportasi di dalam negeri maupun antar negara yang dapat menyebabkan masuknya agen penyakit baru.

## 2. Potensi dan Permasalahan

### a. Upaya Kesehatan

- 1) Kesehatan Ibu
- 2) Kesehatan Anak

### b. Gizi Masyarakat

### c. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

### d. Penyakit Menular

- 1) Tuberkulosis

- 2) HIV/AIDS
- 3) Malaria
- 4) Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi
- 5) Penyakit Infeksi Baru dan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat
- 6) Penyakit Tropis Terabaikan (*Neglected Tropical Diseases*)
- e. Surveilans Penyakit Berbasis Laboratorium
- f. Faktor Resiko Kesehatan Lingkungan
- g. Pelayanan Kesehatan
- h. Sumber Daya Manusia Kesehatan
- i. Tata kelola pembangunan kesehatan, integrasi sistem informasi, serta penelitian dan pengembangan kesehatan
- j. Pembiayaan Kesehatan
- k. Sediaan farmasi dan alat kesehatan
- l. Pemberdayaan masyarakat dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Isu strategis daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Ibu Kota Negara Pindah ke Kalimantan Timur
  - a. Posisi strategis di tengah Indonesia
  - b. Interaksi darat ke Ibu Kota Negara akan mendorong interaksi lebih kuat menuju Kalimantan Timur
  - c. Interaksi laut lebih kuat karena bila selat Makassar adalah sebuah Meja Makan maka Provinsi Kalimantan Selatan adalah salah satu Kursi Makannya.
2. Pandemi Covid-19
  - a. Pengangguran meningkat dari 3,80% pada Februari tahun 2020 menjadi 4,74% di bulan Agustus tahun 2020
  - b. Tingkat kemiskinan pada tahun 2019 yaitu 4,38%, pada Maret tahun 2020 dan diproyeksikan pada akhir tahun 2020 menjadi 5,20%.
  - c. UMKM yang terdampak data sementara 7.395 dan diproyeksikan akan mencapai 10.000 sampai akhir tahun 2020.
3. Pertumbuhan Ekonomi Menurun
  - a. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan berkontraksi akibat Pandemi Covid-19 LPE TW 1-3 tahun 2020 (C-to-C) yaitu -1,23%.
  - b. Harga karet, batubara dan kelapa sawit cenderung menurun karena dipengaruhi ekonomi global.
4. Sumber Daya Manusia

- a. Menyongsong bonus demografi 2030 yaitu akan ada lebih banyak jumlah umur produktif (umur 15 – 64 tahun) pada Populasi Masyarakat di Indonesia.
  - b. Menyongsong industri 4.0 yaitu kedepan semua kegiatan industri akan tergantikan oleh sistem digital.
  - c. Angka rata-rata lama sekolah hanya 8 tahun sehingga rata-rata masyarakat hanya bersekolah sampai dengan kelas 2 SMP.
  - d. Kesehatan
  - e. Sosial
5. Tata Kelola Pemerintahan
  6. Sarana, Prasarana dan Energi
    - a. Sarana dan prasarana perlu diperkuat untuk kualitas dan kenyamanan hidup.
    - b. Konektivitas kawasan-kawasan ekonomi perlu diperkuat
    - c. Terbatasnya energi dan masih menggunakan energi non terbarukan.
  7. Lingkungan Hidup
    - a. Deforestasi, alih fungsi lahan gambut dan bekas lubang tambang masih tinggi
    - b. Terjadi kebakaran hutan dan lahan
    - c. Sungai dan perairan tercemar
    - d. Terjadi banjir hampir setiap tahun
  8. Ditetapkannya Food Estate
  9. Disahkan Omnibuslaw

Arah pembangunan tahun 2021-2026 Provinsi Kalimantan Selatan berfokus pada:

1. Sumber Daya Manusia
  - a. Ketahanan Kesehatan
  - b. Pendidikan Vokasi
  - c. Pemberian Beasiswa
  - d. Balai Latihan Kerja
  - e. Nilai-nilai Keagamaan dan Sosial Budaya
  - f. Indeks Kepemudaan dan Prestasi Olahraga
  - g. Kesetaraan Gender
  - h. Pembangunan yang Inklusif
2. Pemerataan Ekonomi
  - a. Ekonomi Syariah
  - b. Hlirisasi Komoditas Unggulan

- c. Pariwisata Berbasis Alam (Ekowisata/Geopark) dan Religi
  - d. Ekonomi UMKM
  - e. Ekonomi Digital
3. Sarana dan Prasarana
    - a. Sarana dan Prasarana Dasar
    - b. Kawasan-kawasan Ekonomi Baru Mendukung Ibu Kota Negara (IKN)
    - c. Konektivitas Kawasan
    - d. Sarana dan Prasarana Pendukung Perekonomian
    - e. Energi Terbarukan
  4. Tata Kelola Pemerintahan
    - a. Smart Province
    - b. Mempermudah Perijinan/OSS
  5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana
    - a. Pembangunan Ramah Lingkungan
    - b. Revolusi Hijau
    - c. Pengendalian Kebakaran Hutan, Lahan, Banjir dan Pencemaran Lingkungan.

Adapun Strategi dan arah kebijakan:

1. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan
  - Rencana kebutuhan obat disusun sedemikian rupa dengan memperhatikan jenis pelayanan dan kasus terbanyak yang ditangani.
  - Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan diutamakan melalui *e-katalog*.
2. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan
  - Perencanaan pengadaan barang dan jasa disusun sedemikian rupa dengan secara cermat memperhatikan kebutuhan dan perkembangan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum.
  - Proses pengadaan barang dan jasa diselenggarakan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku, terjadwal, terkendali dan dimonitor serta dievaluasi secara berkala.
  - Untuk peningkatan kualitas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, kapasitas dan kualitas SDM pengadaan barang dan jasa perlu dikembangkan secara berkesinambungan.
3. Meningkatkan penyusunan Akreditasi Rumah Sakit
  - Rencana pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana dan peralatan kesehatan disusun dengan memperhatikan standar minimal yang harus dipenuhi.

- Pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana dan peralatan kesehatan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran.
  - Untuk pemenuhan kompetensi SDM, pengembangan kapasitas SDM dilaksanakan secara berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan
  - Peningkatan kompetensi SDM diarahkan untuk pemenuhan standar pelayanan yang berkualitas.
  - Pelayanan kesehatan jiwa diselenggarakan sesuai standar pelayanan dan didukung oleh sarana, prasarana dan peralatan kesehatan yang sesuai dengan standar serta SDM yang berkompeten.
4. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan penduduk miskin.
- Advokasi dan sosialisasi pelayanan kesehatan penduduk miskin kepada pengambil kebijakan anggaran di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Meningkatkan pelayanan kesehatan jiwa.

#### Strategi

- Peningkatan kepatuhan staff terhadap *clinical pathway*.
- Peningkatan kepatuhan pengobatan rasional dengan panduan praktik klinik dan formularium.
- Peningkatan ketepatan waktu pelayanan psikiatrik di IGD dan rawat jalan.
- Peningkatan kualitas pelaksanaan dan dokumentasi keperawatan sesuai SPO.
- Peningkatan kualitas perencanaan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana sesuai standar Rumah Sakit Khusus Kelas A.
- Pemenuhan tenaga penunjang medik sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi.
- Penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dikoordinasikan dengan berbagai stakeholder Rumah Sakit.

#### Arah kebijakan

- Penyusunan pedoman dan panduan *clinical pathway* bagi seluruh staff pelayanan.
- Sosialisasi pengisian form *clinical pathway* bagi seluruh staf pelayanan.
- Penyusunan kebijakan formularium farmasi dan terapi untuk acuan dalam pengobatan.
- Penyusunan dan sosialisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum.
- Workshop SPM bagi seluruh staf Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum.

- Asuhan keperawatan harus dilakukan oleh tenaga perawat yang memenuhi standar kompetensi dan memiliki komitmen tinggi terhadap SPO.
- Rencana pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana dan peralatan kesehatan disusun dengan memperhayikan standar Rumah Sakit Khusus Kelas A.
- Penyusunan analisis kebutuhan tenaga melalui Analisis Beban Kerja (ABK)

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Berdasarkan rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Selatan, tujuan dan sasaran Rencana Kerja (Renja) 2023 RS Jiwa Sambang Lihum adalah :

**Tabel. 3.2.1**

**Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) RS Jiwa Sambang Lihum  
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023**

Tujuan	Sasaran		Target Kinerja Sasaran
	Uraian	Indikator	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
<b>Meningkatnya kualitas pelayanan</b>	Persentase penggunaan tempat tidur	Persentase Bed Occupation Rate (BOR)	65%
	Rata-rata jumlah lamanya pasien dirawat	Jumlah Length of Stay	< 35 Hari
	Tidak adanya kasus bunuh diri selama perawatan	GDR (Gross Deat Rate)	<15‰
	Menurunnya angka kematian	NDR (Net Death Reate)	<15‰
	Tersedianya anggaran publik untuk kesehatan dalam rangka mengurangi risiko finansial akibat gangguan kesehatan bagi seluruh penduduk terutama penduduk miskin	Persentase pasien dari keluarga tidak mampu yang dapat terlayani	100%
	Terciptanya koordinasi yang baik dengan lintas sektor	Indek Kepuasan Masyarakat	90 Poin

Meningkatnya standarisasi & sertifikasi pelayanan kesehatan	Lulus Paripurna	Terakreditasinya Rumah Sakit	100%
	Terselenggaranya diklat teknis	Indeks kepuasan pelanggan yang melaksanakan diklat di RS Jiwa Sambang Lihum	90 Poin
Meningkatnya kompetensi pegawai	Meningkatnya jumlah pegawai yang ikut pelatihan	Persentase pegawai yang melakukan pelatihan minimal 20 jam/tahun	100%
Meningkatnya akuntabilitas birokrasi	Terciptanya koordinasi yang baik terhadap pegawai	Indeks Kepuasan Pegawai	90 Poin
	Meningkatnya nilai sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, dengan hasil LAKIP yang meningkat.	Nilai SAKIP A	A

### 3.3 Program dan Kegiatan

#### a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan RSJ Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan dalam kurun waktu 6 (enam) tahun, maka disusun program dan kegiatan dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 sebagai berikut:

##### A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
  - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD
  - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - e. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
    - b. Pengadaan Mebel
  5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - a. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - a. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  7. Peningkatan Pelayanan BLUD
    - a. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
- B. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
    - a. Pengembangan Rumah Sakit
    - b. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
    - c. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
    - d. Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)
    - e. Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
  2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
    - a. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
  3. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
    - a. Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
- C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
1. Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi
    - a. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
  2. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi

- a. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
- c. Tabel Rencana Program dan Kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Program dan kegiatan RSJ Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan Pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**TABEL TC-33**  
**RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023**  
**DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024**  
**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Unit Organisasi : RSJ SAMBANG LIHUM

Sub Unit Organisasi : RSJ SAMBANG LIHUM

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					Kab. Banjar				74,882,794,728	PAD				91,023,771,910
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					Kab. Banjar				74,882,794,728	PAD				91,023,771,910
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan				Kab. Banjar	100 Poin			60,433,919,451	PAD		Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	100 Poin	65,892,971,910
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Terpenuhinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP	Kab. Banjar		100%		9,384,000	PAD		Persentase Terpenuhinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	10,250,000
1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kab. Banjar		2 Dokumen		2,826,000	PAD		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3,000,000
1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD			Kab. Banjar		1 Dokumen		1,368,000	PAD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1,500,000
1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Kab. Banjar		1 Dokumen		1,368,000	PAD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1,500,000
1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kab. Banjar		2 Laporan		2,196,000	PAD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2,500,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.2.1.1.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kab. Banjar		1 Laporan		1,626,000	PAD		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1,750,000
1.2.1.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Keuangan		Nilai SAKIP	Kab. Banjar			100%	37,620,512,694	PAD		Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Keuangan	100%	31,702,801,110
1.2.1.1.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Kab. Banjar		252 Orang/Bulan		37,570,112,694	PAD	SOTK Baru, Penambahan CPNS & PPPK	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	252 Orang/Bulan	31,652,401,110
1.2.1.1.02.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Kab. Banjar		12 Dokumen		50,400,000	PAD		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	50,400,000
1.2.1.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terpenuhinya Kebutuhan Perlengkapan Gedung dan Peralatan Rumah Tangga		Indeks Pelayanan Publik	Kab. Banjar			80%	78,000	PAD		Terpenuhinya Kebutuhan Perlengkapan Gedung dan Peralatan Rumah Tangga	80%	1,750,000,000
1.2.1.1.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Kab. Banjar		1 Paket		39,000	PAD		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1,000,000,000
1.2.1.1.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Kab. Banjar		1 Paket		39,000	PAD		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	750,000,000
1.2.1.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terpenuhinya Kebutuhan Barang Milik Daerah		Indeks Pelayanan Publik	Kab. Banjar			80%	78,000	PAD		Terpenuhinya Kebutuhan Barang Milik Daerah	80%	1,500,000,000
1.2.1.1.07.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		Kab. Banjar		3 Unit		39,000	PAD		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	750,000,000
1.2.1.1.07.5	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Kab. Banjar		1 Paket		39,000	PAD		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	750,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
1	2	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Indeks Pelayanan Publik	Kab. Banjar			100%	3,494,400,000	PAD		Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	3,619,200,000
1	2	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Banjar		12 Laporan		3,494,400,000	PAD		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3,619,200,000
1	2	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik		Indeks Pelayanan Publik	Kab. Banjar			75%	39,000	PAD		Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik	75%	1,500,000,000
1	2	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Banjar		5 Unit		39,000	PAD		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	1,500,000,000
1	2	1	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD		Persentase Meningkatnya Capaian Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik serta Meningkatnya Mutu Administrasi, Keuangan dan Akuntabilitas Rumah Sakit Jiwa Sumbang Lihum		Indeks Pelayanan Publik	Kab. Banjar			100%	19,309,427,757	PAD		Persentase Meningkatnya Capaian Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik serta Meningkatnya Mutu Administrasi, Keuangan dan Akuntabilitas Rumah Sakit Jiwa Sumbang Lihum	100%	25,810,720,800
1	2	1	1.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kab. Banjar		1 Unit Kerja		19,309,427,757	PAD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	25,810,720,800
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Angka Kematian Bayi (Per 1.000 Kelahiran Hidup) Angka Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup)			Kab. Banjar		8 Angka 111 Angka 12,5%		9,202,246,677	PAD		Angka Kematian Bayi (Per 1.000 Kelahiran Hidup) Angka Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	8 Angka 111 Angka 12,5%	19,596,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.2.2.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Pelayanan, Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Provinsi		Indeks Pelayanan Publik	Kab. Banjar			100%	6,339,391,677	PAD		Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Pelayanan, Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Provinsi	100%	16,250,000,000
1.2.2.1.01.3	Pengembangan Rumah Sakit			Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000		Kab. Banjar		1 Unit		39,000	PAD		Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	5,000,000,000
1.2.2.1.01.9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit		Kab. Banjar		5 Unit		39,000	PAD		Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	5 Unit	1,000,000,000
1.2.2.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan		Kab. Banjar		15 Unit		39,000	PAD		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	15 Unit	2,500,000,000
1.2.2.1.01.14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)			Jumlah Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) yang Disediakan		Kab. Banjar		250 Paket		39,000	PAD		Jumlah Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) yang Disediakan	250 Paket	1,000,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1	2	2	1.01	22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya			Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan		Kab. Banjar		2 Paket	6,339,235,677	PAD	Meningkat Kebutuhan Obat & Makan Minum Pasien	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan	2 Paket	6,750,000,000
1	2	2	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			Terpenuhinya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Provinsi		Kab. Banjar		100%	2,617,770,000	PAD		Terpenuhinya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Provinsi	100%	3,250,000,000
1	2	2	1.02	16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		Kab. Banjar		12 Dokumen	2,617,770,000	PAD	Meningkat Kebutuhan Pasien Miskin	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	3,250,000,000
1	2	2	1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Izin Rumah Sakit		Kab. Banjar		100%	245,085,000	PAD		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Izin Rumah Sakit	100%	96,000,000
1	2	2	1.04	3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan		Kab. Banjar		1 Unit	245,085,000	PAD	Pelaksanaan Akreditasi 2023	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	1 Unit	96,000,000
1	2	3			<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>			<b>Persentase Fasyankes dengan Pemenuhan SDMK Sesuai Standar</b>		<b>Kab. Banjar</b>		<b>59%</b>	<b>5,246,628,600</b>	<b>PAD</b>		<b>Persentase Fasyankes dengan Pemenuhan SDMK Sesuai Standar</b>	<b>59%</b>	<b>5,534,800,000</b>
1	2	3	1.01		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi			Persentase Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Terpenuhi		Kab. Banjar		100%	5,155,620,000	PAD		Persentase Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Terpenuhi	100%	5,334,800,000
1	2	3	1.01	1	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		Kab. Banjar		166 Orang	5,155,620,000	PAD		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	166 Orang	5,334,800,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
1	2	3	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		Persentase Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan		Indeks Pelayanan Publik	Kab. Banjar			100%	91,008,600	PAD		Persentase Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan	100%	200,000,000
1	2	3	1.02	1	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat			Kab. Banjar		500 Orang		91,008,600	PAD		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	500 Orang	200,000,000
<b>TOTAL ANGGARAN</b>														<b>74,882,794,728</b>	<b>TOTAL ANGGARAN</b>			<b>91,023,771,910</b>	

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Kab. Banjar	<b>Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan</b>	<b>60,433,919,451</b>	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Banjar	Persentase Terpenuhinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9,384,000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Banjar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,826,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Kab. Banjar	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,368,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Banjar	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1,368,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Banjar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2,196,000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Banjar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,626,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Banjar	Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Keuangan	37,620,512,694	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Banjar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37,570,112,694	SOTK Baru, Penambahan CPNS & PPPK
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Banjar	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	50,400,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Banjar	Terpenuhinya Kebutuhan Perlengkapan Gedung dan Peralatan Rumah Tangga	78,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Banjar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	39,000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Banjar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	39,000	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Kab. Banjar	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Milik Daerah	78,000	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Banjar	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	39,000	
	Pengadaan Mebel	Kab. Banjar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	39,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Banjar	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3,494,400,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Banjar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3,494,400,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Banjar	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	39,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Banjar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	39,000	
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Kab. Banjar	Persentase Meningkatnya Capaian Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik serta Meningkatnya Mutu Administrasi, Keuangan dan Akuntabilitas Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum	19,309,427,757	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kab. Banjar	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	19,309,427,757	
2	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>Kab. Banjar</b>	<b>Angka Kematian Bayi (Per 1.000 Kelahiran Hidup) Angka Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup) Angka Kesakitan</b>	<b>9,202,246,677</b>	
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Kab. Banjar	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Pelayanan, Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Provinsi	6,339,391,677	
	Pengembangan Rumah Sakit	Kab. Banjar	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	39,000	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Kab. Banjar	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	39,000	
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Kab. Banjar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	39,000	
	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Kab. Banjar	Jumlah Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) yang Disediakan	39,000	
	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Banjar	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan	6,339,235,677	Meningkat Kebutuhan Obat & Makan Minum Pasien
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Kab. Banjar	Terpenuhinya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Provinsi	2,617,770,000	
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kab. Banjar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	2,617,770,000	Meningkat Kebutuhan Pasien Miskin
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Kab. Banjar	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Izin Rumah Sakit	245,085,000	
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Kab. Banjar	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	245,085,000	Pelaksanaan Akreditasi 2023
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>Kab. Banjar</b>	<b>Persentase Fasyankes dengan Pemenuhan SDMK Sesuai Standar</b>	<b>5,246,628,600</b>	
	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Kab. Banjar	Persentase Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Terpenuhi	5,155,620,000	
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kab. Banjar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	5,155,620,000	
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah	Kab. Banjar	Persentase Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan	91,008,600	
	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kab. Banjar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	91,008,600	
<b>TOTAL ANGGARAN</b>				<b>74,882,794,728</b>	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) RSJ Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023, merupakan dokumen perencanaan RSJ Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan tahunan yang berlandaskan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023. Proses penyusunan RKPD Tahun 2023 mengacu pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026. Hal ini dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah yang lebih efektif, efisien dan optimal dalam mencapai sasaran yang sudah ditetapkan.

Demikian Rencana Kerja RSJ Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023 disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan. Diharapkan bahan ini akan membawa manfaat yang besar bagi terlaksananya program pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan yang lebih mudah dan tertata dengan baik disetiap pencapaiannya

#### **A. KESIMPULAN**

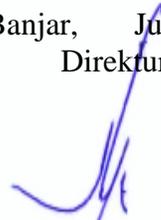
1. Rencana Kerja (Renja) Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021-2026.
2. Rencana Kerja (Renja) Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum tahun 2023 menjadi acuan dan pedoman kerja manajemen Rumah Sakit dalam mengelola Rumah Sakit sehingga terlaksana program dan kegiatan yang direncanakan secara efektif dan efisien.
3. Rumah Sakit sangat optimis tentang perkembangan Rumah Sakit dalam jangka waktu mendatang dengan telah menjadi Rumah Sakit Kelas A dan telah dibukanya layanan-layanan unggulan
4. Pengembangan Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum sesuai dengan Kebijakan Pemerintah Provinsi melalui Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan yang menetapkan Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum menjadi pusat Rujukan Kesehatan Jiwa dan Ketergantungan obat.

#### **B. SARAN**

- Komponen RS terus melakukan konsolidasi dan berkoordinasi dengan pihak-pihak luar untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang ada.
- Agar RS dapat membentuk Komite Mutu atau tim pengendali mutu yang bertugas menyusun program peningkatan mutu dan mengkoordinasikan pelaksanaan program di berbagai unit kerja serta melakukan evaluasi pelaksanaan program dan membuat laporan dan rekomendasi sebagai tindak lanjut.

Rencana Kerja (RENJA) RSJ Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan ini disusun dalam konsep sederhana dengan harapan dapat memberikan pedoman dan gambaran nyata dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta sebagai acuan dan kontribusi yang positif dalam menyusun program dan kegiatan tahun 2023. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) RSJ Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh pegawai di RSJ Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan serta partisipasi aktif seluruh Pejabat terkait.

Banjar, Juli 2022  
Direktur,



**Dr. dr. Anna Martiana Afida, Sp.PK, M.P.H**

Pembina Tk. I

NIP. 19690312 200003 2 001